

**BAB 3**  
**GAMBARAN UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH, PAJAK DAERAH**  
**DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN**  
**SIDOARJO**

Sebelum memasuki pembahasan mengenai peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah, terlebih dahulu akan disampaikan mengenai gambaran umum perekonomian, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo.

**3.1 Kondisi Perekonomian Kabupaten Sidoarjo**

Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Propinsi Jawa Timur, adalah sebuah kabupaten dengan wilayah seluas kurang lebih 714.243 kilometer persegi (berdasarkan luas kecamatan) yang terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan. Perkembangan perekonomian Sidoarjo dari tahun 2004 hingga 2008, yang dilihat melalui PDRB atas dasar harga konstan 2000, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Sidoarjo atas Dasar Harga Konstan 2000, 2004-2008 (Jutaan Rupiah)**

Keterangan	2004	2005	2006	2007*	2008**
PDRB	19.110.831,66	20.201.363,97	21.287.726,59	22.349.583,76	23.429.989,04
Kenaikan (%)	-	5,71	5,38	4,99	4,83

Sumber: Sidoarjo dalam Angka, telah diolah kembali

Catatan: \*angka diperbaiki

\*\*angka sementara

Adanya bencana Lumpur Lapindo yang terjadi sejak 29 Mei 2006 yang masih belum bisa diatasi hingga saat ini karena masih bermunculan semburan-semburan baru, membuat perekonomian Sidoarjo melambat dibanding pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur, seperti ditunjukkan tabel berikut.

**Tabel 3.2 Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidoarjo dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008 (persen)**

Sidoarjo			Jawa Timur		
2006	2007	2008	2006	2007	2008
5,38	4,99	4,82	5,80	6,05	5,90

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo 2008

Seperti yang ditunjukkan tabel di atas, pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Sidoarjo adalah sebesar 5,38% sementara pertumbuhan Jawa Timur adalah 5,80%. Pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Sidoarjo melambat menjadi 4,99% sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Timur meningkat menjadi 6,05%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Sidoarjo kembali terjadi pada tahun 2008 dengan pertumbuhan sebesar 4,82%, dimana pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga melambat menjadi 5,90%.

### 3.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sidoarjo terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah (atau Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan) dan Lain-Lain PAD yang Sah. Perkembangan PAD tersebut dari tahun 2004 hingga 2008, dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3 Perbandingan PAD dengan Pendapatan Sidoarjo, 2004-2008 (Ribuan Rupiah)**

Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008
Pendapatan	658.495.511	724.038.781	980.840.589	1.077.820.398	1.181.599.984
Kenaikan (%)	-	9,95	35,47	9,89	9,63
PAD	128.818.128	135.311.777	178.026.166	190.905.404	213.693.758
Kenaikan (%)	-	5,04	31,57	7,23	11,94
Persentase PAD thd Pendapatan	19,56	18,69	18,15	17,71	18,08

Sumber: Laporan Perhitungan APBD dan LHP BPK RI, telah diolah kembali

Dari tabel di atas, terlihat bahwa baik total Pendapatan maupun Pendapatan Asli Daerah Sidoarjo, dari tahun 2004 hingga tahun 2008, terus mengalami peningkatan. Peningkatan signifikan keduanya terjadi pada tahun 2006, tahun terjadinya bencana Lumpur Lapindo, yaitu Pendapatan naik sebesar 35,47% dibanding tahun 2005, dan PAD naik sebesar 31,57% dibanding PAD tahun 2005. Dari tabel di atas, terlihat pula bahwa kenaikan PAD cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan total pendapatan, kecuali pada tahun 2008. Pada tahun 2005, kenaikan Pendapatan sebesar 9,95% sementara kenaikan PAD sebesar 5,04%. Pada tahun 2006, kenaikan Pendapatan sebesar 35,47% sementara kenaikan PAD sebesar 31,57%. Pada tahun 2007, kenaikan Pendapatan sebesar 9,89% sementara kenaikan PAD sebesar 7,23%. Dan pada tahun 2008, kenaikan Pendapatan sebesar 9,63% sementara kenaikan PAD sebesar 11,94%.

Sedangkan persentase PAD terhadap Pendapatan dari tahun 2004 hingga 2008, berkisar pada angka 17% hingga 19%, dengan rata-rata persentase PAD terhadap Pendapatan adalah sebesar 18,44%. Struktur PAD Sidoarjo terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah (dalam tahun anggaran 2007 dan seterusnya, disebut dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan) dan Lain-Lain PAD yang Sah. Perkembangan masing-masing komponen PAD tersebut dari tahun 2004 hingga tahun 2008, ditunjukkan oleh tabel berikut:

**Tabel 3.4 Komposisi PAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004-2008 (Ribuan Rupiah)**

Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008
PAD	128.818.128	135.311.777	178.026.166	190.905.404	213.693.758
Pajak Daerah	65.375.328	68.108.078	86.314.262	93.294.361	111.960.199
<i>Kontribusi PAD (%)</i>	<i>50,75</i>	<i>50,33</i>	<i>48,48</i>	<i>48,87</i>	<i>52,39</i>
Retribusi Daerah	53.533.917	56.326.566	64.595.514	71.516.045	77.450.960
<i>Kontribusi PAD (%)</i>	<i>41,56</i>	<i>41,63</i>	<i>36,28</i>	<i>37,46</i>	<i>36,24</i>
Bag. Laba Usaha Daerah	2.826.435	3.754.102	4.222.818	4.954.321	7.073.037
<i>Kontribusi PAD (%)</i>	<i>2,19</i>	<i>2,77</i>	<i>2,37</i>	<i>2,60</i>	<i>3,31</i>
Lain-Lain PAD	7.082.446	7.303.029	22.893.571	21.140.675	17.209.561
<i>Kontribusi PAD (%)</i>	<i>5,50</i>	<i>5,40</i>	<i>12,86</i>	<i>11,07</i>	<i>8,05</i>

Sumber: Laporan Perhitungan APBD dan LHP BPK RI, telah diolah kembali

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi komponen PAD Sidoarjo terbesar dari tahun 2004 hingga tahun 2008 adalah Pajak Daerah, walaupun mengalami penurunan maupun kenaikan. Pada tahun 2004, kontribusi Pajak Daerah adalah sebesar 50,75% dan menurun pada tahun 2005 menjadi 50,33%. Pada tahun 2006, terjadi penurunan kontribusi kembali menjadi 48,48%. Tahun 2007 terjadi sedikit peningkatan menjadi 48,87% dan tahun 2008 meningkat cukup tinggi menjadi 52,39%. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD adalah sebesar 50,16%. Sumbangan terbesar kedua diberikan oleh Retribusi Daerah, yang mengalami penurunan kontribusi sejak tahun 2006 dan seterusnya hingga tahun 2008. Rata-rata kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD adalah sebesar 38,63%.

Di tempat ketiga penyumbang PAD adalah Lain-Lain PAD yang Sah. Kontribusi komponen ini meningkat cukup tinggi pada tahun 2006 yaitu sebesar 12,86% dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,40%, dan kemudian menurun kembali menjadi 11,07% pada tahun 2007 dan 8,05% pada tahun 2008. Rata-rata kontribusi komponen ini dari tahun 2004 hingga 2008 adalah 8,58%. Komponen penyumbang PAD terkecil bagi Sidoarjo adalah Bagian Laba Usaha Daerah/Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dengan rata-rata kontribusi dari tahun 2004 hingga 2008 adalah sebesar 2,65%.

Untuk tahun 2009, yaitu tahun yang datanya digunakan dalam penelitian, struktur pendapatan daerah Sidoarjo adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Perbandingan PAD dengan Pendapatan Sidoarjo Tahun 2009 (Rupiah)**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Pendapatan Daerah	1.408.999.721.588,09
Pendapatan Asli Daerah	284.660.711.556,09
Kontribusi PAD thd Pendapatan Daerah (%)	20,20

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Kab. Sidoarjo, telah diolah kembali

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa dibandingkan dengan tahun 2008 (lihat Tabel 3.3), kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

meningkat menjadi 20,20% dari sebelumnya sebesar 18,08%. Kemudian apabila kontribusi PAD pada tahun 2009 dibandingkan dengan rata-rata kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2004-2008 yang sebesar 18,44%, juga terjadi peningkatan.

Dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp284.660.711.556,09 tersebut, kontribusi masing-masing komponen adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.6 Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 (Rupiah)**

<b>Komponen PAD</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kontribusi thd PAD (%)</b>
Pajak Daerah	123.268.123.919,77	43,30
Retribusi Daerah	43.491.131.245,00	15,28
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.695.672.428,30	3,06
Lain-Lain PAD yang Sah	109.205.783.963,02	38,36
Jumlah	284.660.711.556,09	100,00

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kab. Sidoarjo, telah diolah kembali

Tabel 3.6 di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2009, terjadi perubahan pola yang sangat signifikan (bandingkan dengan tabel 3.4). Kontribusi Pajak Daerah turun dari rata-rata tahun 2004-2008 sebesar 50,16% menjadi 43,30%. Retribusi Daerah mengalami penurunan kontribusi yang sangat jauh, yaitu dari rata-rata tahun 2004-2008 sebesar 38,63% menjadi kurang dari setengahnya yaitu 15,28%. Kontribusi hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2009 adalah sebesar 3,06%, meningkat dari rata-rata kontribusi pada tahun 2004-2008. Kenaikan kontribusi signifikan terjadi pada komponen Lain-lain PAD yang Sah, yaitu sebesar 38,36% pada tahun 2009, dibandingkan rata-rata tahun 2004-2008 yang hanya sebesar 8,58%.

### 3.3 Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

Pajak Daerah di Sidoarjo terdiri atas enam jenis, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir. Perkembangan penerimaan pajak-pajak daerah tersebut dijelaskan oleh tabel di bawah ini.

**Tabel 3.7 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2009 (Rupiah)**

Jenis Pajak	2007	2008	2009
Pajak Hotel	545.326.741,00	864.117.024,00	1.109.496.925,00
Pajak Restoran	4.789.962.068,00	6.404.461.459,00	8.332.720.550,00
Pajak Hiburan	422.418.300,00	290.414.290,00	140.775.355,00
Pajak Reklame	3.626.620.712,00	4.644.824.607,00	4.976.239.307,00
Pajak Penerangan Jalan	81.871.134.557,00	97.107.056.780,00	105.595.380.482,77
Pajak Parkir	2.038.899.600,00	2.649.325.800,00	3.113.511.300,00
Jumlah	93.294.361.978,00	111.960.199.960,00	123.268.123.919,77

Sumber: LHP BPK RI dan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kab. Sidoarjo, telah diolah kembali

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa kecenderungan dari pajak-pajak daerah tersebut mengalami kenaikan penerimaan, kecuali Pajak Hiburan yang memiliki kecenderungan penurunan. Kontribusi pajak daerah terbesar setiap tahunnya diberikan oleh Pajak Penerangan Jalan, dengan kontribusi sebesar 87,76% pada tahun 2007, sebesar 86,73% pada tahun 2008, dan 85,66 % pada tahun 2009. Kontribusi terendah berasal dari Pajak Hiburan, yaitu sebesar 0,45% pada tahun 2007, sebesar 0,26% pada tahun 2008, dan 0,11 % pada tahun 2009.

### 3.4 Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo

Berbagai informasi berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan di Sidoarjo akan disampaikan di sini. Perkembangan target dan realisasi Pajak Bumi

dan Bangunan Sidoarjo untuk semua sektor (Perdesaan, Perkotaan, Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan) disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.8 Perkembangan Target dan Realisasi PBB untuk Semua Sektor Tahun 2004-2008 (Ribuan Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
2004	60.644.844	66.581.839	109,79
2005	82.097.230	95.252.242	116,02
2006	117.083.695	138.345.752	118,16
2007	151.671.000	172.353.876	113,64
2008	190.036.992	183.075.432	96,34

Sumber: Sidoarjo dalam Angka 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa kecuali pada tahun 2008, target Pajak Bumi dan Bangunan di Sidoarjo untuk semua sektor selalu mencapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

Sedangkan kondisi yang membentuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Semua Sektor, yaitu jumlah Wajib Pajak, Luas Tanah, Luas Bangunan dan Nilai Pajak, disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.9 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sidoarjo Tahun 2004-2008**

Tahun	Wajib Pajak	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Nilai Pajak (Rp000)
2004	659.830	613.974.884	26.882.225	48.810.571
2005	649.437	612.364.966	28.027.737	62.998.541
2006	671.030	610.175.808	29.013.783	74.696.559
2007	662.033	604.441.998	29.516.871	91.193.136
2008	685.188	604.303.299	30.798.240	97.917.608

Sumber: Sidoarjo dalam Angka 2009

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk jumlah Wajib Pajak, mengalami fluktuasi atau terjadi kenaikan dan penurunan. Untuk Luas Tanah, terjadi kecenderungan penurunan, dari seluas 613.974.884 m<sup>2</sup> pada tahun 2004, menjadi 604.303.299 m<sup>2</sup> pada tahun 2008. Berkebalikan dengan luas tanah, luas bangunan justru mengalami kecenderungan peningkatan, dari seluas 26.882.225 m<sup>2</sup> pada tahun 2004 menjadi 30.798.240 m<sup>2</sup> pada tahun 2008. Perubahan jumlah wajib pajak, luas tanah dan luas bangunan, ternyata secara keseluruhan membuat nilai pajak memiliki kecenderungan peningkatan, yaitu dari Rp48.810.571.000,00 pada tahun 2004, menjadi Rp97.917.608.000,00 pada tahun 2008.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara dan disetor sepenuhnya ke rekening kas negara. Kabupaten/kota mendapatkan alokasi sebesar 64,8% dari penerimaan tersebut, ditambah dengan bagian dari pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota, dan insentif kabupaten/kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu. Untuk Sidoarjo, perkembangan besarnya penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004-2009 (Rupiah)**

Tahun	Jumlah	Kenaikan (%)
2004	52.004.139.593	-
2005	74.078.079.802	42,45
2006	106.156.324.895	43,30
2007	128.246.249.792	20,81
2008	129.852.138.936	1,25
2009	130.927.607.385	0,83

Sumber: Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Sidoarjo beberapa tahun, telah diolah kembali



Selanjutnya, untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perkembangannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.11 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 2004-2008 (Ribuan Rupiah)**

<b>Keterangan</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Target Pedesaan	5.418.646	6.657.515	7.238.514	8.233.163	12.231.397
Realisasi Pedesaan	4.060.888	5.005.736	5.376.814	8.313.568	9.969.231
<i>Persentase Realisasi Pedesaan</i>	<i>74,94</i>	<i>75,19</i>	<i>74,28</i>	<i>100,98</i>	<i>81,51</i>
Target Perkotaan	43.391.920	56.319.706	67.438.045	82.959.973	81.183.835
Realisasi Perkotaan	36.122.666	47.106.581	54.851.830	69.592.277	75.183.643
<i>Persentase Realisasi Perkotaan</i>	<i>83,25</i>	<i>83,64</i>	<i>81,34</i>	<i>83,89</i>	<i>92,61</i>
Total Target	48.810.566	62.977.221	74.676.559	91.193.136	93.415.232
Realisasi Total	40.183.554	52.112.317	60.228.644	77.905.845	85.152.774
<i>Persentase Realisasi Total</i>	<i>82,33</i>	<i>82,75</i>	<i>80,65</i>	<i>85,43</i>	<i>91,16</i>

Sumber: Sidoarjo dalam Angka 2009, telah diolah kembali

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara kumulatif, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak pernah mencapai apalagi melampaui target yang telah ditetapkan, namun sejak tahun 2007 mengalami peningkatan pencapaian. Kecuali pada tahun 2007, persentase pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan lebih besar dibandingkan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, termasuk PBB Perdesaan dan Perkotaan lebih banyak dilakukan oleh Direktorat Perpajakan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sejak diterbitkannya Keputusan Jenderal Pajak tanggal 5 November 2007 Nomor KEP-158/PJ./2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Sidoarjo, dilakukan oleh tiga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, yaitu KPP Pratama Sidoarjo Barat, KPP Pratama Sidoarjo Utara dan KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Mulai beroperasinya ketiga KPP Pratama tersebut adalah tanggal 27 November 2007. KPP Pratama merupakan gabungan dari tiga instansi terdahulu, yaitu Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB). Masing-masing KPP Pratama tersebut membawahi jumlah kecamatan yang berbeda-beda.

Untuk KPP Pratama Sidoarjo Barat, kecamatan yang dilingkupi adalah:

- Kecamatan Sukodono
- Kecamatan Taman
- Kecamatan Krian
- Kecamatan Wonoayu
- Kecamatan Balongbendo
- Kecamatan Tarik
- Kecamatan Prambon
- Kecamatan Krembung
- Kecamatan Tulangan

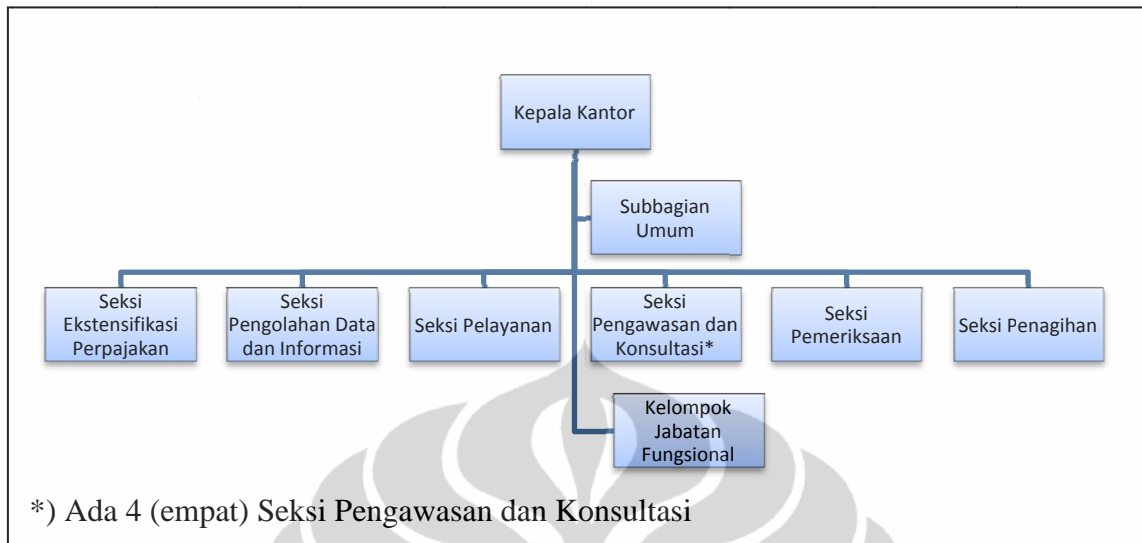
Adapun wilayah yang dilingkupi KPP Pratama Sidoarjo Utara adalah:

- Kecamatan Buduran
- Kecamatan Gedangan
- Kecamatan Sedati
- Kecamatan Waru

Sedangkan wilayah yang dilingkupi KPP Pratama Sidoarjo Selatan adalah:

- Kecamatan Sidoarjo
- Kecamatan Candi
- Kecamatan Tanggulangin
- Kecamatan Porong
- Kecamatan Jabon

Adapun struktur organisasi pada KPP Pratama adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama

Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ./2007

Secara umum, tugas Kepala Kantor dan masing-masing Kepala Seksi adalah sebagai berikut:

- Kepala Kantor  
Meningat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KP PBB, dan Karikpa, maka Kepala KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kepala Subbagian Umum  
Membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

- **Kepala Seksi Pelayanan**  
Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- **Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi**  
Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing* dan penyiapan laporan kinerja.
- **Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi**  
Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPH, PPN, PBB, BPHTB dan Pajak Lainnya), bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (teritorial) tertentu.
- **Kepala Seksi Ekstensifikasi**  
Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Kepala Seksi Pemeriksaan**  
Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan,

penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

- Kepala Seksi Penagihan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

- Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

- *Account Representative*

Dalam organisasi KPP Pratama terdapat jabatan *Account Representative* (Staf Pendukung Pelayanan) yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Ikhtisar tugas *Account Representative* adalah pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi, melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku, memberikan informasi perpajakan.